

Agensi Humanistik dan Dehumanisasi Kolonial dalam *Bumi Manusia* Karya Pramoedya Ananta Toer

Puad Fatoni^{1*}, Andi Sutisno², Tri Pujiatna³

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan dan Sains,
Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

*Corresponding Author Email: fatonipuad@gmail.com

Diterima: 27 Juni, 2026, Direvisi: 13 Agustus, 2026, Disetujui: 18 Agustus, 2026

ABSTRACT

*This study aims to examine the relationship between humanist agency and colonial dehumanization in Pramoedya Ananta Toer's *Bumi Manusia*, focusing on how self-definition, dignity, education, and affiliation intersect with colonial mechanisms of racial classification, legal inequality, and institutional control. The study employs an interpretive qualitative approach using directed qualitative content analysis on the 37th printing of the novel, with data comprising narratives, dialogues, character descriptions, and conflict episodes collected through close reading and systematic documentation. Data are analyzed using Martha C. Nussbaum's capabilities approach and Achille Mbembe's critique of colonial power. The findings show that humanist agency is represented through self-definition, human dignity, education and critical awareness, and affiliation and solidarity, particularly in the experiences of Annelies, Minke, and Nyai Ontosoroh, while colonial power operates through racial classification, legal inequality, institutional coercion, restricted mobility, and control over familial relations and individual life trajectories. Education enables Minke to recognize structural injustice but does not grant him equal institutional power, and relations built through care, marriage, and solidarity remain vulnerable before colonial legal classification. This study contributes to postcolonial literary studies by showing that humanism functions not merely as a moral theme but as an evaluative framework for reading colonial power as dehumanization. The findings indicate that colonial power becomes dehumanizing when it systematically restricts individuals' capacity to act as subjects of their own lives.*

Keywords: *Bumi Manusia; colonial dehumanization; colonial power; human capabilities; humanist agency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara agensi humanistik dan dehumanisasi kolonial dalam novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, dengan fokus pada bagaimana penentuan diri, martabat, pendidikan, dan afiliasi tokoh berhadapan dengan mekanisme kolonial berupa klasifikasi rasial, ketimpangan hukum, dan kontrol institusional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode analisis isi kualitatif terarah (*directed qualitative content analysis*) pada novel cetakan ke-37; data berupa kutipan naratif, dialog, deskripsi tokoh, dan episode konflik yang dikumpulkan melalui *close reading* dan dokumentasi sistematis, lalu dianalisis menggunakan pendekatan kapabilitas Martha C. Nussbaum dan kritik kekuasaan kolonial Achille Mbembe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agensi humanistik direpresentasikan melalui penentuan diri, martabat manusia, pendidikan dan kesadaran kritis, serta afiliasi dan solidaritas, khususnya pada pengalaman Annelies, Minke, dan Nyai Ontosoroh, sementara kekuasaan kolonial bekerja melalui klasifikasi rasial, ketimpangan hukum, tekanan institusional, pembatasan mobilitas, serta kontrol atas relasi keluarga dan arah hidup individu. Pendidikan

memungkinkan Minke mengenali ketidakadilan struktural, tetapi tidak memberinya kekuasaan institusional yang setara, dan relasi yang dibangun melalui kepedulian, perkawinan, dan solidaritas tetap rentan di hadapan klasifikasi hukum kolonial. Penelitian ini berkontribusi pada kajian sastra poskolonial dengan menunjukkan bahwa humanisme berfungsi bukan sekadar tema moral, melainkan sebagai kerangka evaluatif untuk membaca kekuasaan kolonial sebagai dehumanisasi. Temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kolonial menjadi dehumanisasi ketika secara sistematis membatasi kemampuan individu untuk bertindak sebagai subjek atas kehidupannya sendiri.

Kata Kunci: Bumi Manusia; dehumanisasi kolonial; kekuasaan kolonial; kemampuan manusia; peran aktif humanis.

PENDAHULUAN

Novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer menghadirkan masyarakat kolonial bukan sekadar sebagai latar sejarah, melainkan sebagai tatanan sosial yang menentukan siapa yang berhak diakui, didengar, memperoleh pendidikan, memiliki kedudukan hukum, dan menentukan jalan hidupnya sendiri (Sarijan, 2015). Melalui pengalaman Minke, Nyai Ontosoroh, dan Annelies, novel ini memperlihatkan bagaimana ras, status hukum, pendidikan, gender, dan kedekatan seseorang dengan struktur kekuasaan memengaruhi ruang geraknya sebagai manusia (Tyas, 2021). Konflik yang muncul tidak hanya mempertemukan penjajah dan yang dijajah secara langsung, tetapi juga menyangkut persoalan yang lebih mendasar: siapa yang memiliki hak untuk menentukan identitas seseorang, mengakui hubungan keluarga, menetapkan kedudukan sosial, dan mengesahkan pilihan hidup. Sejumlah penelitian telah membaca *Bumi Manusia* sebagai karya yang kuat dalam merepresentasikan kolonialisme, nasionalisme, diskriminasi rasial, dan ketimpangan sosial pada masa Hindia Belanda (Assahab, Erawati, & Junaidi, 2023; Farhana F & Aflahah, 2019). Persoalan-persoalan tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme dalam novel Pramoedya bekerja tidak hanya melalui penguasaan wilayah, tetapi juga melalui pengaturan kehidupan sehari-hari dan hubungan antarmanusia.

Kajian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami cara kolonialisme direpresentasikan dalam *Bumi Manusia* (Ryan & Darmawan, 2025). Farhana F & Aflahah (2019), misalnya, melihat

keterkaitan kolonialisme dan nasionalisme serta menunjukkan konsistensi kritik Pramoedya terhadap dominasi kolonial Belanda. Rosda, Sari, & Susanto (2024) lebih khusus membahas rasisme sebagai salah satu bentuk penindasan yang bekerja melalui pembedaan ras dan kedudukan sosial. Pembacaan lain menempatkan Nyai Ontosoroh sebagai tokoh yang mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam struktur sosial kolonial (Setiawan, Madeamin, & Nurcholis, 2022), sementara (Hatibie, 2024) memperlihatkan bagaimana konflik kelas dan ketimpangan sosial membentuk pengalaman tokoh-tokoh pribumi. Kajian poskolonial juga telah digunakan untuk membaca persoalan identitas dan relasi kolonial dalam novel tersebut. Dari berbagai penelitian itu terlihat bahwa kolonialisme dalam *Bumi Manusia* tidak dapat dipahami hanya sebagai penjajahan politik. Kekuasaan kolonial juga hadir melalui klasifikasi sosial, ketimpangan hukum, hierarki ras, dan perbedaan kemampuan seseorang untuk memperoleh pengakuan serta mengendalikan kehidupannya.

Di sisi lain, sejumlah penelitian memberi perhatian pada persoalan kebebasan, martabat manusia, gender, dan kemanusiaan. Hardiningtyas (2015) membaca *Bumi Manusia* melalui persoalan eksistensi manusia dan identitas kultural, sedangkan Safitri, Hajrah, & Asri (2021) menempatkan perjuangan Nyai Ontosoroh dalam perspektif feminisme liberal. Kajian mengenai marginalisasi tokoh Nyai Ontosoroh juga memperlihatkan bahwa kedudukan sebagai perempuan dan pribumi tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pengalaman ketidakadilan yang dialaminya (Setiawan et al., 2022). Penelitian lain menyoroti nilai kemanusiaan, pendidikan, kesadaran kritis, dan perlawanan sebagai bagian penting dari pemikiran yang hadir dalam karya Pramoedya (Hun, 2025; Prameswari & Fauzan, 2025). Rangkaian kajian tersebut memperlihatkan bahwa perlawanan dalam *Bumi Manusia* tidak hanya berkaitan dengan upaya menghadapi kekuasaan kolonial secara politik, tetapi juga dengan usaha manusia mempertahankan hak untuk berpikir, memilih, mencintai, belajar, serta memperoleh penghargaan sebagai manusia yang memiliki martabat.

Meski demikian, dua kecenderungan kajian tersebut umumnya bergerak pada jalur yang berbeda. Penelitian mengenai kolonialisme lebih banyak membahas diskriminasi rasial, ketimpangan hukum, hierarki sosial, marginalisasi, dan pembentukan identitas kolonial. Sementara itu, kajian mengenai sisi kemanusiaan cenderung menyoroti nilai martabat, kebebasan, pendidikan, kesadaran kritis, dan perlawanan. Keduanya sama-sama penting, tetapi hubungan antara nilai kemanusiaan dan mekanisme kekuasaan kolonial belum banyak dijelaskan sebagai satu kesatuan analisis. Padahal, persoalan yang lebih mendasar bukan hanya apakah *Bumi Manusia* memuat nilai humanisme atau kritik terhadap kolonialisme, melainkan bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi dasar untuk memahami mengapa praktik kolonial tertentu dipandang merendahkan manusia. Dengan cara pandang semacam ini, diskriminasi, pembatasan hukum, pengendalian terhadap tubuh, ataupun pemaksaan terhadap pilihan hidup tidak sekadar dibaca sebagai bentuk ketidakadilan sosial, tetapi sebagai tindakan yang mengurangi kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Celah inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Untuk membaca persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kapabilitas Martha C. Nussbaum sebagai landasan normatif dalam memahami dimensi humanistik yang terdapat dalam novel. Nussbaum (2011) menempatkan martabat manusia dalam hubungan yang erat dengan tersedianya kesempatan nyata bagi seseorang untuk mengembangkan dan menjalankan kemampuan-kemampuan dasar dalam hidupnya. Beberapa kemampuan yang relevan dengan penelitian ini antara lain kebebasan menentukan pilihan, kemampuan berpikir dan mempertimbangkan kehidupan secara kritis, relasi dengan orang lain, integritas tubuh, serta kendali atas lingkungan dan keputusan yang memengaruhi kehidupan seseorang. Kerangka ini memungkinkan humanisme dibaca tidak hanya sebagai gagasan abstrak tentang penghargaan terhadap manusia, tetapi sebagai persoalan konkret mengenai

apakah seseorang memiliki kesempatan untuk berpikir, memilih, membangun hubungan, menentukan identitas, dan mempertahankan harga dirinya. Dalam *Bumi Manusia*, persoalan-persoalan itu hadir melalui pendidikan, pilihan hidup, relasi keluarga, posisi hukum, serta perjuangan tokoh dalam mempertahankan keberadaannya di tengah struktur kolonial.

Pembacaan mengenai kekuasaan kolonial kemudian diperdalam melalui pemikiran Achille Mbembe mengenai kedaulatan kolonial dan kekuasaan yang mengatur kondisi kehidupan kelompok tertentu. Mbembe (2020) menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya bekerja melalui administrasi politik, tetapi juga melalui penciptaan kondisi yang membuat kelompok tertentu hidup dalam tingkat kerentanan, keterpaksaan, dan ketidakberdayaan yang lebih besar. Dalam masyarakat kolonial, pembedaan ras memiliki peran penting karena menentukan perbedaan akses terhadap hukum, kekuasaan, perlindungan, dan pengakuan. Penelitian ini tidak menggunakan konsep *necropolitics* untuk menyebut seluruh bentuk diskriminasi yang terdapat dalam novel. Konsep tersebut digunakan secara terbatas dan hati-hati untuk membaca bagian-bagian ketika kekuasaan kolonial bukan hanya membatasi hak, tetapi secara lebih mendalam menentukan kondisi hidup, tubuh, hubungan keluarga, dan masa depan seseorang. Pembedaan ini diperlukan karena kekuasaan kolonial dalam *Bumi Manusia* bekerja melalui banyak jalur, mulai dari hukum, ras, klasifikasi sosial, tekanan institusional, hingga campur tangan terhadap ruang domestik dan kehidupan pribadi.

Pendekatan Mbembe (2020); Nussbaum (2011) digunakan secara beriringan karena keduanya menjawab sisi persoalan yang berbeda. Nussbaum membantu menjelaskan apa yang dipertaruhkan ketika martabat, kebebasan memilih, kemampuan berpikir, hubungan sosial, dan kendali atas hidup seseorang dibatasi. Mbembe (2020) membantu membaca bagaimana pembatasan tersebut dimungkinkan oleh struktur kekuasaan kolonial yang menempatkan kelompok manusia dalam posisi yang tidak setara. Dengan mempertemukan kedua kerangka tersebut,

penelitian ini tidak menempatkan humanisme dan kolonialisme sebagai dua tema yang berdiri sendiri. Humanisme justru digunakan sebagai landasan etik untuk membaca akibat kekuasaan kolonial terhadap kehidupan manusia. Dari titik inilah kritik terhadap kolonialisme memperoleh makna yang lebih dalam: kolonialisme dipersoalkan bukan hanya karena menciptakan ketimpangan politik atau sosial, tetapi karena mengurangi ruang manusia untuk menjadi subjek atas kehidupannya sendiri.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara representasi nilai-nilai humanistik dan mekanisme kekuasaan kolonial dalam novel *Bumi Manusia*. Kajian diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu bagaimana martabat manusia, kebebasan menentukan diri, kesadaran kritis, dan solidaritas direpresentasikan melalui tokoh serta konflik dalam novel; bagaimana kekuasaan kolonial bekerja melalui hukum, hierarki rasial, tekanan institusional, dan pengendalian terhadap kehidupan pribadi; serta bagaimana kedua dimensi tersebut bertemu dalam membentuk kritik Pramoedya terhadap kolonialisme. Penelitian ini menawarkan pembacaan yang menempatkan humanisme bukan sekadar sebagai tema yang berjalan berdampingan dengan kritik kolonial, melainkan sebagai landasan etik yang memungkinkan tindakan-tindakan kolonial dikenali sebagai bentuk dehumanisasi. Melalui pembacaan tersebut, *Bumi Manusia* dapat dipahami sebagai narasi tentang manusia yang berusaha mempertahankan hak untuk berpikir, memilih, membangun hubungan, dan menentukan hidupnya ketika seluruh kemungkinan itu dibatasi oleh struktur kekuasaan yang tidak setara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode analisis isi kualitatif terarah (*directed qualitative content analysis*) (Alyaqoub, Alsharairi, & Aslam, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemaknaan teks, bukan pada

pengukuran frekuensi kemunculan unsur tertentu (Alyaqoub, Alsharairi, & Aslam, 2024; Halim et al., 2025). Metode *directed content analysis* digunakan karena analisis sejak awal dipandu oleh kerangka teoretis, di mana teori atau temuan sebelumnya membentuk kategori awal yang kemudian diuji dan diperdalam melalui data (Çetinkaya, 2025; Hsieh & Shannon, 2005). Dalam penelitian ini, kerangka Nussbaum (2011) tentang kapabilitas manusia dan Mbembe (2020) tentang kekuasaan kolonial digunakan sebagai dasar untuk membaca relasi antara kemanusiaan dan dehumanisasi dalam *Bumi Manusia*.

Objek material penelitian adalah novel *Bumi Manusia* karya Pramoedya Ananta Toer, cetakan ke-37 (Toer, 2025). Data primer berupa kutipan teks dalam bentuk narasi, dialog, deskripsi tokoh, dan peristiwa yang berkaitan dengan kemanusiaan dan kolonialisme. Unit analisis ditentukan berdasarkan kesatuan makna, bukan panjang kutipan. Data dipilih apabila menunjukkan tindakan, pengalaman, atau relasi antartokoh yang berkaitan dengan martabat manusia, otonomi diri, kesadaran kritis, relasi sosial, integritas tubuh, atau kontrol atas kehidupan. Unsur kolonial diidentifikasi ketika teks memperlihatkan hierarki rasial, otoritas hukum kolonial, kekerasan, tekanan institusional, atau intervensi terhadap tubuh dan kehidupan tokoh.

Pengumpulan data dilakukan melalui *close reading* dan dokumentasi sistematis (Qamariah & Marta, 2025). Novel dibaca secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks peristiwa, relasi tokoh, posisi narator, dan situasi sosial. Kutipan relevan dicatat bersama nomor halaman, konteks, tokoh, dan kategori awal. Prosedur ini mengikuti prinsip analisis isi kualitatif yang menekankan sistematisasi unit analisis dan keterlacakan data, agar makna tidak terlepas dari konteks naratifnya.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, identifikasi data relevan. Kedua, pengodean dan klasifikasi menggunakan kategori deduktif dari Nussbaum (2011) (martabat, otonomi, afiliasi, kesadaran kritis, kontrol hidup) dan Mbembe (2020) (hierarki rasial, kekuasaan kolonial,

kekerasan, dan kontrol tubuh). Kategori bersifat terbuka dan dapat saling beririsan sesuai konteks teks. Ketiga, interpretasi dilakukan dengan membaca hubungan data terhadap konflik, posisi sosial tokoh, dan struktur kolonial, tidak sekadar mengklasifikasikan sebagai “humanisme” atau “kekerasan”, tetapi menelaah pengalaman, mekanisme kuasa, dan dampaknya. Keempat, sintesis antarkategori dilakukan untuk melihat relasi antara pembatasan kapabilitas manusia dan kerja kekuasaan kolonial dalam struktur naratif novel.

Validitas interpretasi dijaga melalui pembacaan ulang, pengecekan kesesuaian data dengan kategori, serta perbandingan antar-kutipan dalam kategori yang sama. Konsep *necropolitics* digunakan secara terbatas hanya pada situasi yang menunjukkan kontrol kolonial atas kehidupan, tubuh, atau masa depan subjek secara ekstrem. Pendekatan ini memastikan analisis tetap berbasis data tekstual dan tidak melampaui batas makna yang dapat didukung oleh teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agen Humanis di Bawah Batasan Kolonial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa humanisme dalam *Bumi Manusia* tidak hadir sebagai nilai yang berdiri di luar kolonialisme, tetapi justru terbentuk melalui benturan dengan struktur kolonial itu sendiri. Martabat, kebebasan menentukan diri, kemampuan berpikir, dan relasi sosial memperoleh makna karena semuanya berada dalam situasi yang dibatasi oleh klasifikasi ras, status hukum, dan hierarki sosial kolonial. Dalam konteks ini, agensi tidak selalu muncul sebagai perlawanan langsung, tetapi juga sebagai tindakan kecil seperti menegaskan identitas, mempertahankan cara berpikir, atau membangun relasi yang tidak diakui secara institusional. Humanisme Pramoedya dengan demikian bergerak dari pengalaman personal menuju kritik sosial yang lebih luas, di mana subjek berusaha tetap menjadi penentu atas dirinya di tengah sistem yang terus mendefinisikan mereka dari luar. Kemampuan untuk tetap bertindak dan mempertahankan fungsi dalam menghadapi tekanan juga berkaitan

dengan gagasan mengenai resiliensi, yaitu kemampuan suatu sistem untuk menghadapi gangguan dan tetap mempertahankan keberlangsungannya

Relasi awal Minke dan Annelies memperlihatkan hal tersebut. Ketika Annelies menyatakan bahwa “Pribumi juga baik” dan mengaitkannya dengan ibunya (Toer, 2025, p.22) ia tidak sekadar bersikap ramah, tetapi menggeser dasar penilaian manusia dari kategori rasial menuju relasi antarsubjek. Identitas “pribumi” yang dalam sistem kolonial berfungsi sebagai penanda inferioritas tidak lagi dijadikan ukuran nilai kemanusiaan. Kesetaraan di sini tidak lahir dari perubahan struktur, tetapi dari penolakan individu untuk menjadikan klasifikasi kolonial sebagai dasar relasi.

Penolakan itu menjadi lebih tegas ketika Annelies menolak identitas Indo: “Aku bukan Indo. Tak mau jadi Indo. Aku mau hanya seperti Mama” (Toer, 2025, p.29). Tindakan ini menunjukkan bahwa identitas kolonial tidak sepenuhnya menentukan diri seseorang. Dalam kerangka Nussbaum (2011), kemampuan membentuk konsepsi tentang diri merupakan bagian dari martabat manusia. Karena itu, pilihan Annelies dapat dibaca sebagai bentuk agensi, meskipun ia tetap berada dalam struktur kolonial yang membatasi. Identitas di sini tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi juga dinegosiasikan melalui kesadaran personal.

Temuan ini memperluas kajian sebelumnya tentang kebebasan dan identitas (Hardiningtyas, 2015; Setiawan et al., 2022). Kebebasan dalam novel tidak berlangsung dalam ruang netral, tetapi selalu berhadapan dengan sistem klasifikasi yang sudah menentukan nilai sosial seseorang. Karena itu, agensi Annelies tidak dapat dipahami sebagai kebebasan individual semata, melainkan sebagai tindakan yang memiliki implikasi politis dalam masyarakat kolonial yang hierarkis.

Dimensi martabat ini menjadi lebih kompleks pada tokoh Nyai Ontosoroh. Berbeda dari Annelies yang menegosiasikan identitas, Nyai menghadapi struktur yang sejak awal menempatkannya dalam posisi subordinat. Meskipun memiliki kemampuan mengelola keluarga dan usaha, pengakuan sosial dan hukum terhadap dirinya tetap terbatas.

Perjuangannya bukan hanya untuk dihormati, tetapi untuk memastikan bahwa kapasitasnya diakui setara dengan otoritas formal. Dalam perspektif kapabilitas, terdapat kesenjangan antara kemampuan nyata dan pengakuan institusional. Nyai memiliki agensi praktis, tetapi tidak memiliki legitimasi hukum yang sepadan, sehingga martabatnya terus dinegosiasikan dalam struktur kolonial.

Agensi Minke berkembang melalui pendidikan dan pembentukan kemampuan berpikir kritis. Sejak awal ia menyadari bahwa pendidikan membuat dirinya “agak berbeda” dari kebanyakan pribumi Toer (2025, p.4). Namun, perbedaan ini tidak menghapus struktur kolonial yang tetap menempatkannya sebagai subjek terpinggirkan. Pendidikan kolonial bersifat ambivalen: ia membuka akses pengetahuan sekaligus mempertahankan hierarki sosial. Dalam kerangka Nussbaum (2011), pendidikan ini membentuk *practical reason*, yaitu kemampuan menilai dan mengevaluasi kehidupan. Karena itu, pendidikan Minke tidak hanya menghasilkan mobilitas sosial, tetapi juga kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural.

Hal ini diperkuat oleh pernyataannya bahwa ia lebih mempercayai “ilmu-pengetahuan, akal” (Toer, 2025, p.8). Rasionalitas di sini menjadi alat untuk menciptakan jarak kritis terhadap realitas sosial. Pendidikan memungkinkan Minke memahami bahwa ketimpangan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan hasil konstruksi sosial. Diskusi di kelas yang dipimpin Magda Peters juga memperkuat kemampuan ini melalui latihan berpikir, berdialog, dan mempertanyakan realitas. Ketika pengalaman ini bertemu dengan ketidakadilan yang dialami Nyai dan Annelies, pengetahuan berubah menjadi kesadaran sosial yang menolak menyamakan hukum dengan keadilan.

Namun, agensi humanistik dalam novel tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dibentuk melalui afiliasi. Relasi antara Minke, Annelies, dan Nyai menunjukkan ruang kemanusiaan yang tidak sepenuhnya tunduk pada klasifikasi kolonial. Dalam hubungan ini,

pengakuan dibangun melalui kedekatan, perhatian, dan pengalaman bersama, bukan status sosial. Dalam kerangka Nussbaum (2011), *affiliation* merupakan kemampuan penting karena manusia membutuhkan relasi yang tidak merendahkan martabatnya. Relasi mereka menciptakan bentuk pengakuan yang tidak diberikan oleh sistem kolonial.

Hal ini tampak jelas dalam hubungan Nyai dan Annelies, ketika Nyai menyatakan bahwa dukacitanya hilang karena melihat senyum anaknya (Toer, 2025, p. 513). Afeksi ini menunjukkan bahwa relasi ibu-anak memiliki realitas kemanusiaan yang tidak dapat dihapus oleh klasifikasi hukum. Demikian pula, perhatian Minke terhadap Annelies memperlihatkan bahwa empati menjadi bentuk pengakuan ketika institusi gagal mengakui subjek sebagai manusia.

Ketegangan antara relasi kemanusiaan dan hukum kolonial mencapai puncaknya ketika Annelies dipisahkan dari Minke dan Nyai. Minke memanggilnya, tetapi Annelies tidak lagi menoleh (Toer, 2025, p. 526). Adegan ini memperlihatkan benturan antara dua sistem legitimasi: relasi afektif yang dibangun melalui kehidupan bersama, dan otoritas hukum kolonial yang menentukan masa depan individu. Seperti ditunjukkan Maharani, Fauzan, & Fahyumi (2024), solidaritas menjadi bentuk resistensi terhadap kolonialisme, tetapi dalam konteks ini solidaritas juga berfungsi mempertahankan pengakuan kemanusiaan yang tidak diberikan oleh hukum.

Dari keseluruhan temuan, terlihat bahwa martabat, pendidikan, dan afiliasi tidak bekerja sebagai tiga elemen terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan agensi humanistik. Penolakan identitas kolonial, kemampuan berpikir kritis, dan relasi sosial saling menopang dalam membentuk subjek yang tetap mampu bertindak meskipun berada dalam keterbatasan. Agensi ini tidak selalu menghasilkan kemenangan, tetapi mempertahankan kemampuan untuk menilai, memilih, dan berhubungan sebagai manusia.

Dengan demikian, humanisme dalam *Bumi Manusia* tidak sekadar hadir sebagai nilai moral, tetapi sebagai dasar untuk menguji legitimasi

kekuasaan kolonial. Mengacu pada pendekatan kapabilitas Nussbaum, novel ini memperlihatkan bagaimana ketidaksetaraan dalam akses terhadap kemampuan dasar berpikir, memilih, berelasi, dan mengendalikan hidup menghasilkan kondisi dehumanisasi. Kolonialisme menjadi problematik bukan hanya karena dominasi politik, tetapi karena ia membatasi kemungkinan manusia untuk hidup sebagai subjek yang utuh.

Temuan utama subbagian ini menunjukkan bahwa agensi humanistik dalam novel bekerja pada level yang lebih fundamental daripada oposisi langsung terhadap kolonialisme. Ia muncul dalam upaya mempertahankan hak untuk mendefinisikan diri, menggunakan akal untuk menilai dunia, dan menjaga relasi kemanusiaan di tengah sistem yang tidak mengakuinya. Dengan demikian, humanisme dalam *Bumi Manusia* berfungsi sebagai dasar etik sekaligus kritik terhadap kolonialisme, karena memperlihatkan jarak antara kemampuan manusia sebagai subjek dan struktur yang membatasi realisasi kemampuan tersebut.

Kekuasaan Kolonial sebagai Mekanisme Dehumanisasi

Jika bagian sebelumnya menyoroti upaya tokoh *Bumi Manusia* mempertahankan agensi, bagian ini menunjukkan batas struktural yang membatasinya. Kekuasaan kolonial tidak hanya hadir sebagai dominasi politik, tetapi bekerja melalui hukum, klasifikasi rasial, aparat, dan pengaturan ruang yang menjangkau kehidupan personal. Dehumanisasi muncul bukan semata melalui kekerasan fisik, tetapi ketika pengalaman, kehendak, dan relasi manusia kehilangan bobot di hadapan institusi. Dengan demikian, kolonialisme menjadi sistem yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mendistribusikan secara tidak setara kemampuan untuk menentukan hidup.

Ketimpangan ini tampak jelas dalam konflik hukum antara Minke, Annelies, dan Nyai Ontosoroh. Pernyataan bahwa perkawinan mereka “tidak syah” karena Annelies dianggap belum cukup umur Toer (2025, p.480) menunjukkan bahwa hukum tidak sekadar mengatur, tetapi menentukan realitas mana yang diakui. Relasi yang secara sosial dan

emosional telah hidup menjadi tidak berlaku ketika berhadapan dengan otoritas institusional. Hukum kolonial dengan demikian berfungsi sebagai mekanisme yang mengubah pengalaman manusia menjadi sesuatu yang dapat dihapus dari pengakuan resmi.

Temuan ini memperdalam kajian Maharani et al. (2024) tentang ketimpangan kolonial dengan menunjukkan bahwa hukum bukan latar netral, melainkan instrumen produksi ketidaksetaraan. Ia dapat memisahkan keluarga, membatasi relasi, dan meniadakan legitimasi pengalaman hidup. Ketika pengakuan institusional lebih menentukan daripada pengalaman manusia, hukum menjadi bagian dari struktur kuasa, bukan penengahnya.

Ketegangan ini disadari Minke dalam refleksinya: “Aku sudah berusaha... dan aku kalah” (Toer, 2025, p. 515). Istilah “kalah” menandakan bahwa hukum bekerja sebagai relasi kekuatan, bukan sekadar prosedur. Meskipun Minke memiliki pendidikan dan argumen, ia tidak memiliki posisi setara di hadapan institusi kolonial. Kekalahan ini menunjukkan batas agensi: kemampuan intelektual tidak otomatis berubah menjadi kuasa institusional.

Dimensi struktural semakin jelas ketika Minke bertanya, “Sebegini lemah Pribumi di hadapan Eropa?” (Toer, 2025, p. 526). Pertanyaan ini menggeser pengalaman personal menjadi kesadaran sistemik tentang hierarki rasial. Sejalan dengan perbedaan rasial dalam novel tidak hanya bersifat sosial, tetapi memperoleh kekuatan melalui institusi hukum yang menentukan pengakuan dan akibat tindakan seseorang.

Dalam kerangka Mbembe (2020), kondisi ini mencerminkan kedaulatan kolonial yang mengatur kehidupan melalui penetapan status, mobilitas, dan masa depan subjek. Kekuasaan menjadi material ketika keputusan hukum dijalankan melalui aparat, pembatasan ruang, dan pemisahan keluarga. Hukum tidak berhenti sebagai teks, tetapi menjadi praktik yang mengatur tubuh dan kehidupan sehari-hari.

Hal ini tampak ketika Minke, Nyai, dan Annelies dibatasi geraknya dan diawasi serdadu Marsose (Toer, 2025, pp. 520-521). Rumah berubah menjadi ruang kontrol, bukan lagi ruang keluarga. Kekuasaan kolonial bekerja dengan menghapus batas antara ruang privat dan intervensi negara, sehingga tubuh menjadi objek pengaturan. Kehadiran aparat bahkan tanpa kekerasan langsung sudah cukup untuk menciptakan kepatuhan melalui ancaman struktural.

Pengalaman Nyai Ontosoroh memperlihatkan bahwa dehumanisasi telah berlangsung sebelum konflik hukum utama. Ia menggambarkan dirinya sebagai “dijual seperti anak kuda” dan hidup sebagai “budak belian” (Toer, 2025, p. 120). Metafora ini menunjukkan bahwa tubuh perempuan dapat diperlakukan sebagai objek transaksi, sementara kehendaknya tidak menentukan nasibnya sendiri. Di sini kolonialisme berkelindan dengan patriarki, menghasilkan kerentanan berlapis bagi perempuan pribumi.

Pengalaman tersebut berlanjut pada Annelies, yang “dituntun seperti seekor sapi” saat dipisahkan dari keluarganya (Toer, 2025, p. 525). Perpindahan ini bukan sekadar perjalanan, tetapi transformasi subjek menjadi objek yang diarahkan oleh kekuasaan. Keheningan Annelies (“tak menengok, tak bersuara”) (Toer, 2025, p.526) memperkuat hilangnya agensi, karena tubuhnya sepenuhnya berada dalam kendali institusi.

Dalam konteks ini, logika kedaulatan kolonial Mbembe dapat digunakan secara terbatas: kekuasaan menentukan kondisi hidup dan mobilitas subjek. Namun, teks ini tidak perlu langsung dibaca sebagai necropolitics penuh, karena tidak menampilkan produksi kematian, melainkan pengaturan kehidupan secara koersif. Pembatasan ini penting agar analisis tetap proporsional terhadap data.

Kekuatan kritik Pramodya justru terletak pada kerja simultan berbagai mekanisme: hukum memberi legitimasi, ras membentuk hierarki, aparat memastikan pelaksanaan, dan kontrol ruang mengatur tubuh. Dehumanisasi tidak selalu hadir sebagai kekerasan terbuka, tetapi sebagai hilangnya kemampuan subjek untuk menentukan hidupnya sendiri.

Relasi ini juga menjelaskan bahwa kolonialisme dalam novel tidak hanya konflik Eropa-pribumi, tetapi sistem pengaturan diferensial. Minke dapat berpendidikan tetapi tetap tidak berkuasa; Nyai dapat produktif tetapi tidak diakui; Annelies dapat memiliki relasi sosial tetapi tidak memiliki kontrol atas tubuhnya. Kolonialisme bekerja melalui distribusi ketidaksetaraan, bukan keseragaman penindasan.

Dengan demikian, dehumanisasi dalam *Bumi Manusia* adalah proses bertahap: dimulai dari klasifikasi sosial, diperkuat oleh ketimpangan hukum, dan mencapai bentuk paling konkret ketika tubuh dan masa depan dapat diputuskan tanpa persetujuan subjek. Dalam konfigurasi ini, humanisme tokoh penentuan diri, afiliasi, dan kesadaran kritis berhadapan langsung dengan struktur yang mengurangi manusia menjadi status administratif dan objek hukum.

Temuan ini menegaskan bahwa kekuasaan kolonial bekerja melalui transformasi perbedaan sosial menjadi ketidaksetaraan kemampuan untuk menentukan kehidupan. Kritik Pramoedya memperoleh kekuatan etisnya dari titik ini: legalitas kolonial dapat sah secara administratif, tetapi tetap kehilangan legitimasi kemanusiaan ketika ia meniadakan agensi subjek yang terdampak.

Humanisme sebagai Landasan Etis Kritik Kolonial

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam *Bumi Manusia*, humanisme dan kolonialisme tidak hadir sebagai dua ranah terpisah, melainkan saling membentuk. Agensi tokoh melalui kemampuan berpikir, memilih, dan membangun relasi selalu berhadapan dengan struktur kolonial yang membatasi realisasinya. Karena itu, kolonialisme tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi sebagai mekanisme yang mengurangi kemungkinan manusia untuk bertindak sebagai subjek. Dalam kerangka ini, kritik kolonial dalam novel memperoleh dasar etis ketika praktik hukum, klasifikasi rasial, dan kontrol institusional dinilai berdasarkan dampaknya terhadap martabat dan kapasitas manusia.

Ketegangan tersebut tampak jelas pada persoalan identitas. Penolakan Annelies terhadap identitas Indo menunjukkan upaya mempertahankan hak menentukan diri di tengah sistem yang telah menetapkan kategori rasial secara kaku. Namun, temuan juga memperlihatkan bahwa identitas dalam kolonialisme tidak bersifat netral; ia menentukan posisi sosial dan akses terhadap pengakuan. Dengan demikian, pilihan Annelies tidak hanya bersifat personal, tetapi memperlihatkan konflik antara agensi individu dan struktur sosial yang mengatur identitas sebagai hierarki. Dalam perspektif Nussbaum, (2011), hal ini berkaitan dengan kemampuan menentukan hidup secara bermartabat, sementara Mbembe (2020) menjelaskan bagaimana kolonialisme menciptakan distribusi kemampuan yang tidak setara.

Ketegangan serupa muncul dalam relasi pendidikan dan hukum pada tokoh Minke. Pendidikan memberinya kapasitas berpikir kritis dan kesadaran terhadap ketidakadilan, tetapi tidak mengubah posisinya dalam struktur hukum kolonial. Ia mampu memahami ketimpangan, namun tidak memiliki daya institusional untuk mengubah keputusan yang berdampak pada Annelies. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam novel tidak otomatis menghasilkan pembebasan, melainkan membentuk agensi yang tetap dibatasi oleh struktur kekuasaan. Dengan demikian, terdapat jarak antara kesadaran kritis dan kemampuan transformasi sosial.

Namun demikian, pendidikan tetap memiliki fungsi penting dalam pemikiran humanistik Pramoedya, yaitu sebagai sarana untuk mengungkap kontradiksi sistem kolonial itu sendiri. Institusi kolonial memberikan akses pengetahuan sekaligus mempertahankan hierarki rasial yang membatasi subjek seperti Minke. Dari kontradiksi ini lahir kesadaran kritis yang memungkinkan dominasi tidak hanya dialami, tetapi juga dikenali dan dipersoalkan secara moral.

Dimensi lain dari relasi humanisme dan kolonialisme tampak pada persoalan afiliasi. Hubungan Minke, Annelies, dan Nyai Ontosoroh dibangun melalui pengalaman hidup bersama, pengasuhan, dan tanggung

jawab emosional. Namun, hukum kolonial mendefinisikan relasi tersebut secara berbeda melalui legitimasi formal. Ketika perkawinan tidak diakui dan posisi Nyai sebagai ibu tidak memiliki kekuatan hukum, terjadi benturan antara pengakuan berbasis pengalaman dan pengakuan berbasis institusi. Novel ini dengan demikian mempertanyakan apakah legalitas dapat dianggap adil ketika mengabaikan relasi kemanusiaan yang nyata.

Dalam kerangka Nussbaum (2011), *affiliation* mencakup kemampuan membangun relasi yang diakui tanpa degradasi martabat. Relasi ketiga tokoh memenuhi dimensi ini secara pengalaman, tetapi kolonialisme membatasi pengakuannya secara institusional. Mbembe (2020) membantu menjelaskan bahwa kekuasaan kolonial tidak hanya mengatur hukum, tetapi juga mengontrol ruang, tubuh, dan masa depan individu. Pemisahan Annelies menunjukkan bahwa kekuasaan formal dapat memutus relasi kemanusiaan yang telah terbentuk secara nyata.

Untuk merangkum hubungan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Relasi Agensi Humanistik dan Mekanisme Kekuasaan Kolonial dalam Bumi Manusia

Dimensi humanistik	Mekanisme kolonial	Representasi dalam novel	Makna analitis
Penentuan diri	Klasifikasi rasial	Penolakan identitas Indo oleh Annelies	Identitas kolonial membatasi otonomi diri
Martabat	Ketimpangan hukum	Nyai tidak diakui secara legal	Pengakuan sosial tidak menjamin pengakuan institusional
Kesadaran kritis	Akses kekuasaan terbatas	Minke memahami ketidakadilan	Agensi intelektual tidak identik

Dimensi humanistik	Mekanisme kolonial	Representasi dalam novel	Makna analitis
		tetapi kalah di pengadilan	dengan kekuasaan politik
Afiliasi	Legitimasi keluarga formal	Relasi keluarga tidak diakui hukum kolonial	Relasi manusia dapat didelegitimasi oleh institusi
Kendali hidup	Aparat dan pemindahan paksa	Annelies dipisahkan dari keluarga	Kekuasaan kolonial mengontrol tubuh dan masa depan

Sumber: Analisis penulis berdasarkan (Mbembe, 2020; Nussbaum, 2011)

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa kolonialisme bekerja dengan membatasi kapasitas-kapasitas dasar manusia: identitas, martabat, pemikiran, relasi, dan kendali hidup. Dengan demikian, humanisme berfungsi sebagai ukuran untuk mengidentifikasi apa yang dirampas oleh struktur kolonial, sementara kolonialisme menjelaskan mekanisme perampasan tersebut.

Dalam konteks ini, dehumanisasi tidak dipahami sebagai hilangnya seluruh kemanusiaan, tetapi sebagai penyempitan ruang agensi manusia. Tokoh-tokoh seperti Minke, Nyai, dan Annelies tetap memiliki kemampuan berpikir, bekerja, dan berelasi, tetapi kemampuan tersebut tidak diikuti oleh pengakuan dan hak yang setara. Inilah kontradiksi utama kolonialisme: manusia tetap “berfungsi” sebagai subjek, tetapi tidak diakui sepenuhnya sebagai subjek yang berdaulat.

Humanisme dalam *Bumi Manusia* karena itu tidak berhenti pada nilai moral seperti kasih sayang atau keberanian, tetapi berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap struktur sosial. Ketika suara manusia tidak memiliki bobot yang setara, ketika relasi ibu dan anak tidak diakui secara hukum,

atau ketika tubuh dapat dipindahkan oleh keputusan institusi, maka yang dipersoalkan bukan hanya ketidakadilan individual, tetapi struktur pengakuan itu sendiri.

Pendekatan Nussbaum dan Mbembe dalam penelitian ini tidak diposisikan sebagai teori yang identik, tetapi saling melengkapi. Nussbaum menjelaskan kapasitas yang membentuk kehidupan bermartabat, sedangkan Mbembe menjelaskan bagaimana kekuasaan kolonial mengatur distribusi kapasitas tersebut secara tidak setara. Kombinasi keduanya memperjelas bahwa kolonialisme dalam novel bukan sekadar dominasi politik, tetapi pengaturan atas kemungkinan hidup manusia.

Kekalahan Minke dan Nyai dalam mempertahankan Annelies memperkuat argumen ini. Meskipun secara hukum mereka gagal, kegagalan tersebut justru memperlihatkan ketegangan antara legalitas dan legitimasi moral. Kekuasaan kolonial dapat memaksakan keputusan, tetapi tidak dapat menghapus pertanyaan etis tentang martabat manusia yang dikorbankan.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa humanisme merupakan dasar etik bagi kritik kolonial dalam *Bumi Manusia*. Kolonialisme dapat dipahami sebagai dehumanisasi karena ia membatasi kemampuan manusia untuk menentukan diri, berpikir, berelasi, dan mengendalikan hidupnya. Persoalan utama bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi bagaimana kekuasaan tersebut mengubah kondisi menjadi manusia yang utuh.

Pada akhirnya, *Bumi Manusia* dapat dibaca sebagai narasi yang menguji legitimasi kekuasaan melalui pengalaman manusia yang mengalaminya. Pramoedya tidak menempatkan kemenangan sebagai syarat kritik kolonial. Sebaliknya, justru melalui kegagalan tokoh-tokohnya, terlihat dengan jelas batas antara kekuasaan legal dan keadilan kemanusiaan. Humanisme di sini berfungsi bukan sebagai optimisme, tetapi sebagai dasar untuk menilai dan menolak struktur yang mereduksi manusia menjadi objek keputusan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa humanisme dan kritik kolonialisme dalam *Bumi Manusia* tidak hadir sebagai dua gagasan yang terpisah. Nilai humanistik memperoleh maknanya justru ketika tokoh-tokohnya berhadapan dengan struktur kolonial yang membatasi kemampuan mereka untuk menentukan diri, memperoleh pengakuan, menggunakan nalar secara kritis, membangun hubungan, dan mempertahankan kendali atas kehidupan. Annelies memperlihatkan negosiasi terhadap identitas yang dilekatkan oleh tatanan kolonial; Minke menunjukkan pembentukan agensi melalui pendidikan dan kesadaran kritis; sedangkan Nyai Ontosoroh memperlihatkan perjuangan mempertahankan martabat dan pengakuan di tengah keterbatasan hukum serta status sosial. Pada sisi lain, kekuasaan kolonial bekerja melalui klasifikasi rasial, ketimpangan hukum, intervensi institusional, pengawasan, serta kontrol terhadap tubuh dan hubungan keluarga. Dehumanisasi dalam novel karena itu tidak hanya muncul dalam tindakan kekerasan terbuka, tetapi dalam penyempitan ruang manusia untuk menjadi subjek atas kehidupannya sendiri.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa humanisme berfungsi sebagai landasan etik bagi kritik kolonial Pramoedya. Pendekatan kapabilitas membantu menjelaskan apa yang dipertaruhkan ketika martabat, pilihan, pemikiran, afiliasi, dan kendali hidup seseorang dibatasi, sedangkan pembacaan atas kekuasaan kolonial memperlihatkan bagaimana pembatasan tersebut dilembagakan melalui hukum dan hierarki sosial. Pertemuan kedua perspektif ini menunjukkan adanya jarak antara legalitas dan legitimasi kemanusiaan. Kekuasaan kolonial dapat menetapkan keputusan yang sah secara institusional, tetapi legalitas tersebut tidak dengan sendirinya menjadikannya adil ketika suara, pengalaman, dan kehendak orang yang menanggung akibatnya dikesampingkan. Dari titik inilah kontribusi penelitian ini ditempatkan: *Bumi Manusia* tidak hanya merepresentasikan kolonialisme sebagai sistem

dominasi, tetapi memperlihatkan bahwa kritik terhadap kolonialisme dibangun melalui ukuran kemanusiaan sejauh mana suatu tatanan memungkinkan atau justru membatasi manusia untuk hidup sebagai subjek yang bermartabat.

Penelitian ini terbatas pada pembacaan tekstual terhadap satu novel dengan menggunakan pendekatan kapabilitas dan kritik terhadap kekuasaan kolonial sebagai kerangka interpretatif. Temuan yang dihasilkan karena itu tidak dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan pemikiran humanisme maupun kolonialisme dalam karya-karya Pramoedya Ananta Toer, juga tidak menjelaskan bagaimana pembaca pada konteks sejarah yang berbeda menerima dan memaknai novel tersebut. Penelitian selanjutnya dapat memperluas korpus pada novel-novel lain dalam Tetralogi Buru, membandingkan representasi agensi dan kekuasaan kolonial antarteks, atau menggabungkan analisis tekstual dengan kajian resepsi pembaca. Arah tersebut dapat memperlihatkan apakah hubungan antara martabat manusia dan kritik terhadap struktur kolonial yang ditemukan dalam *Bumi Manusia* berkembang, berubah, atau memperoleh bentuk lain dalam keseluruhan narasi Pramoedya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyaqoub, R., Alsharairi, A., & Aslam, M. (2024). Elaboration of underpinning methods and data analysis process of directed qualitative content analysis for communication studies. *Journal of Intercultural Communication*, 24(2), 108–116.
<https://doi.org/10.36923/jicc.v24i2.573>
- Assahab, A., Erawati, M., & Junaidi, J. K. (2023). Gambaran nasionalisme pada awal kebangkitan nasional dalam novel bumi manusia dan anak semua bangsa karya pramoedya ananta toer. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(2), 21–32.
<https://doi.org/10.22437/jejak.v3i2.24874>
- Çetinkaya, M. (2025). A methodological approach to content analysis of

- qualitative data in science education: An applied example. *Pedagogical Perspective*, 4(1), 197–209. <https://doi.org/10.29329/pedper.2025.86>
- Farhana F, R., & Aflahah, A. (2019). Kolonialisme dan nasionalisme dalam novel bumi manusia karya Pramoedya Ananta Toer. *GHANCARAN: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v1i1.2946>
- Halim, M. F., Marhamah, S., Susiawati, W., & Royani, A. (2025). Pendekatan dalam penelitian bahasa dan sastra. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 622–628. <https://doi.org/10.63822/32ay9v53>
- Hardiningtyas, P. R. (2015). Manusia dan budaya jawa dalam roman bumi manusia: eksistensialisme pemikiran jean paul sartre. *Aksara*, 27(1), 83–98. <https://doi.org/10.29255/aksara.v27i1.174>
- Hatibie, Y. (2024). Pertentangan Kelas Dalam Novel bumi manusia karya pramoedya ananta toer. *Reduplikasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia*, 4(2), 90–115. <https://doi.org/10.37905/rjppbi.v4i2.2697>
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
- Koh, Y. H. (2025). Kemanusiaan sebagai pemikiran dasar pramoedya ananta toer. *Proceeding Bali-Bhuwana Waskita: Global Art Creativity Conference*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.31091/bbwp.v5i1.614>
- Maharani, A. P., Fauzan, I. M., & Fahyumi, A. (2024). Peran alur dan setting melalui konflik dalam novel “bumi manusia” karya pramoedya ananta toer. *Lingua Franca*, 3(2), 33–46. <https://doi.org/10.37680/linguafranca.v3i2.6642>
- Mbembe, A. (2020). *Necropolitics*. Duke University Press. <https://doi.org/10.1515/9781478007227>
- Nussbaum, M. C. (2011). The human development approach. In *Creating capabilities*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard. <https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200>

- Prameswari, I. G., & Fauzan, A. (2025). Nilai-nilai humanisme dalam novel namaku alam karya leila chudori. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(2), 2341–2356. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i2.5823>
- Putra, D. W. K., Widuatie, R. E., Arkananta, A. F., Kirana, N., Maulana, A. H., & Ariyanto, C. A. (2025). Refleksi nilai kemanusiaan dalam novel bumi manusia karya pramoedya ananta toer dalam kelas pancasila 41. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 873–879.
- Qamariah, E., & Marta, R. (2025). Peningkatan keterampilan membaca pemahaman menggunakan model pembelajaran cooperative tipe start with a question di sekolah dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 238–249. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.35243>
- Rosda, F. S., Sari, D. T. P., & Susanto, D. (2024). Gagasan perlawanan pramoedya ananta toer terhadap revolusi: Analisis fakta kemanusiaan dalam novel larasati. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 13(2), 263–272. <https://doi.org/10.26499/jentera.v13i2.7686>
- Ryan, P., & Darmawan, R. I. (2025). Revealing the colonial hypocrisy: racism and identity on this earth of mankind. *Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Culture Studies*, 14(Special Issue), 122–128. <https://doi.org/10.15294/rainbow.v14i.30196>
- Safitri, R., Hajrah, H., & Asri, A. (2021). Perjuangan tokoh nyai ontosoroh dalam novel bumi manusia karya pramoedya ananta toer: Tinjauan feminisme liberal. *Neologia: Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.59562/neologia.v2i1.19620>
- Sarijan. (2015). Refleksi manusia terjajah dalam novel bumi manusia karya pramoedya ananta toer: Kajian poskolonial. *Edu-Kata: Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 22(1), 23. <https://doi.org/10.52166/kata.v2i1.4610>
- Setiawan, W., Madeamin, R., & Nurcholis, N. (2022). Analisis marginalisasi dan diskriminasi tokoh nyai ontosoroh dalam roman bumi manusia karya pramoedya ananta toer. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Bahasa*, 1(1),

153–165. <https://doi.org/10.55606/jurribah.v1i1.1988>

Sofianto, M. F. R. K. (2019). Rasisme dalam novel bumi manusia karya prmoedya ananta toer: Kajian sosiologi sastra. *Diglosia : Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia*, 3(2), 2. Retrieved from <https://jurnal.unma.ac.id/index.php/dl/article/view/1320/1410>

Toer, P. A. (2025). *Bumi manusia*. Lentera Dipantara.

Tyas, A. A. (2021). Kajian feminisme dalam novel “bumi manusia” karya pramoedya ananta toer. *Jurnal Simki Pedagogia*, 4(2), 159–168. <https://doi.org/10.29407/jsp.v4i2.45>